

Beberapa Peraturan Terkait Compliance

Pahamilah Beberapa Peraturan Berikut


Mengimplementasikan Ide
Memahami Compliance



HASIL KOLABORASI OLEH TIM:

DITULIS & DIADAPTASI OLEH:
Mega Puspita Pertiwi

TERINSPIRASI DARI:
Eric Sherbet (2014) The Top Five Business Benefits of Compliance

UU Republik Indonesia





Beberapa Peraturan Terkait Compliance

Info Tambahan

Ada banyak hukum dan peraturan yang harus dipatuhi oleh Usaha Sosial Anda. Hukum dan peraturan tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan aktivitas Usaha Sosial:

- Legal
- Operasional
- Sumber Daya Manusia
- Finansial
- Pemasaran
- Lingkungan



HUKUM & PERATURAN YANG PERLU ANDA PERHATIKAN :

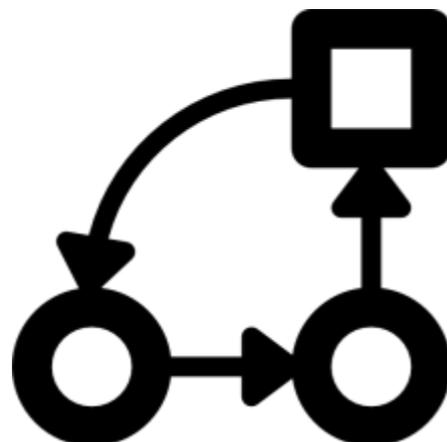
1. Beberapa Aturan terkait Legal

Saat Anda mendirikan Usaha Sosial, tentunya ada peraturan-peraturan terkait pendirian usaha. Dalam beberapa peraturan yang ada, Usaha Sosial Anda wajib memiliki dokumen surat tertentu sebagai izin pendirian usaha. Contohnya adalah sebagai berikut:

- Surat Keterangan Domisili Usaha
- NPWP Usaha
- Surat Izin Perdagangan
- Akta Pendirian Usaha
- Surat Izin Lingkungan (sangat penting terutama jika Usaha Sosial Anda memiliki pabrik yang memproduksi suatu produk dan memiliki dampak negatif pada lingkungan seperti limbah dan polusi)
- Pendaftaran Merk Dagang agar masyarakat mengetahui nama produk dengan mudah.
- Pendaftaran Paten atau Hak Cipta. Dengan mematenkan produk atau jasa Usaha Sosial maka Anda memiliki hak cipta atas produk atau jasa tersebut. Dengan mendaftarkan merek, Anda dapat menuntut siapa saja yang meniru produk Usaha Sosial Anda tanpa izin. Jika ada pihak lain memiliki produk yang sama dengan Anda, kemudian mematenkan produknya lebih dulu ketimbang Anda, maka Anda akan terkena sanksi pelanggaran hak cipta. Walaupun ide tersebut murni pemikiran Anda. Karena itu, paten sangat penting terlebih jika produk dan jasa yang Anda tawarkan merupakan hasil inovasi dan teknologi.



Beberapa Peraturan Terkait Compliance



HUKUM & PERATURAN YANG PERLU ANDA PERHATIKAN :

2. Beberapa Aturan Terkait Aktivitas Operasional

Setiap industri memiliki peraturan tertentu yang mengatur usaha terkait aktivitas operasionalnya. Berikut ini adalah contoh-contoh peraturan yang perlu Anda ketahui berdasarkan jenis industrinya:

Industri Obat dan Makanan

- Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
Dibutuhkan jika Usaha Sosial Anda bergerak dalam produksi makanan skala kecil (rumah tangga) sebagai bentuk sertifikasi atas keamanan produk yang Anda produksi.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan
Jika Usaha Sosial Anda memproduksi makanan atau obat-obatan dengan modal berskala menengah atau besar dan bukan lagi termasuk industri rumah tangga, Anda harus mendaftarkan produk pada BPOM. Setelah BPOM memberikan izin maka Anda dapat memproduksi dan mengedarkan produk tersebut.

Industri Jasa Keuangan

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang mengawasi industri jasa Keuangan di Indonesia. Segala bentuk industri jasa keuangan diatur oleh OJK. Penting bagi Anda untuk memahami lebih lanjut peraturan dari OJK melalui situs resmi OJK : <http://www.ojk.go.id/>

Industri Secara Umum

- Standar Nasional Indonesia (SNI)
SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis (dulu disebut sebagai Panitia Teknis) dan ditetapkan oleh BSN. Ada berbagai jenis industri dengan kegiatan operasional, produk atau jasa yang dihasilkan harus memenuhi SNI. Anda dapat mengetahui lebih lanjut melalui situs BSN yaitu: <http://sisni.bsn.go.id/>



Beberapa Peraturan Terkait Compliance



HUKUM & PERATURAN YANG PERLU ANDA PERHATIKAN

3. Beberapa Aturan Terkait Manajemen Sumber Daya Manusia

Anggota Tim dalam Usaha Sosial Anda merupakan salah satu bagian penting yang haknya tak boleh diabaikan. Anda tentu ingin menjadikan Usaha Sosial Anda baik, beretika dan patuh terhadap hukum, terutama dalam memperlakukan tim. Maka ada peraturan perundang-undangan yang harus Anda perhatikan, yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

UU tersebut mengatur segala hal tentang ketenagakerjaan meliputi:

- Siapa itu tenaga kerja
- Jam kerja
- Penggajian
- Perencanaan kerja
- Pelatihan kerja
- Tenaga kerja asing
- Magang
- Pemutusan hubungan kerja
- Penyelesaian konflik industrial
- Serikat Pekerja, dll



Beberapa Peraturan Terkait Compliance



HUKUM & PERATURAN YANG PERLU ANDA PERHATIKAN

4. Beberapa Aturan Terkait Aktivitas Finansial

Bagian finansial sangat penting bagi Usaha Sosial karena pada dasarnya usaha adalah tentang bagaimana menciptakan nilai tambah yang diukur secara kuantitatif melalui laba yang dihasilkan. Meski usaha yang dilakukan adalah Usaha Sosial, laba merupakan komponen penting. Adanya laba yang stabil dan cenderung meningkat memungkinkan berkembangnya Usaha Sosial yang dapat memberi dampak positif lebih besar terhadap lingkungan. Tentunya, urusan finansial juga diatur oleh Undang-Undang tertentu. Berikut ini adalah perundang-undangan yang perlu Anda Ketahui.

- UU RI Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- UU RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Dll

Adapun lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan terkait aktivitas keuangan yang perlu Anda perhatikan adalah:

- Direktorat Jenderal Pajak
- Bank Indonesia
- Kementerian Keuangan
- BKPM
- OJK



Beberapa Peraturan Terkait Compliance



HUKUM & PERATURAN YANG PERLU ANDA PERHATIKAN

5. Beberapa Aturan Terkait Aktivitas Pemasaran

Saat Anda memutuskan untuk memasarkan produk Anda, ada beberapa etika dan peraturan yang harus dipenuhi. Dalam memasarkan produk dan jasa, Anda dilarang melakukan praktik monopoli. Selain itu, dalam memasarkan produk dalam konteks periklanan, Anda harus memahami apakah konten iklan yang dibuat mematuhi peraturan yang ada, misal tidak mengandung SARA.

Peraturan tentang pemasaran yang perlu Anda ketahui untuk Usaha Sosial Anda antara lain adalah:

- UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat



Beberapa Peraturan Terkait Compliance



HUKUM & PERATURAN YANG PERLU ANDA PERHATIKAN

6. Beberapa Aturan Terkait Aktivitas Berdampak Lingkungan

Saat Anda memulai menjalankan Usaha Sosial, ada pihak lain yang terkena dampaknya baik secara positif maupun negatif. Pihak lain ini adalah masyarakat dan lingkungan sekitar tempat Usaha Sosial Anda berada. Karena itulah, penting bagi Anda turut serta memerhatikan lingkungan di sekitar Anda dan memahami peraturan yang berlaku. Peraturan tentang lingkungan yang perlu Anda pahami antara lain adalah:

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup